

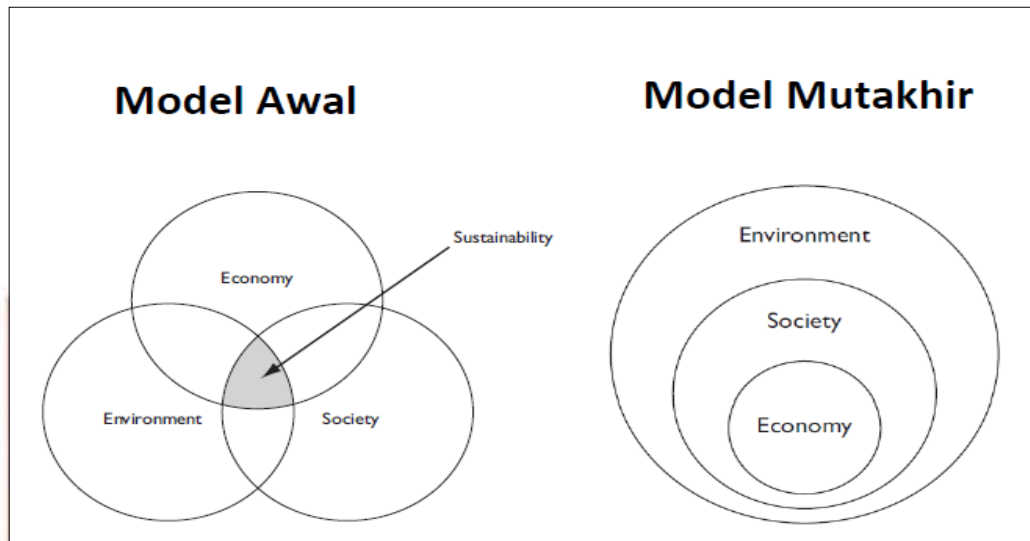
BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan pembangunan di wilayah pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Untuk itu maka salah satu hal yang penting untuk peningkatan kesejahteraan tersebut adalah tersedianya kebutuhan air bersih. Tanpa adanya air bersih sulit masyarakat tersebut untuk sejahtera. Ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Tanpanya kelangsungan kehidupan masyarakat akan terganggu tersebut penyakit bahkan tidak bisa beraktifitas. Oleh sebab itu adalah wajar jika sektor air bersih mendapatkan prioritas penanganan utama baik di pedesaan maupun di perkotaan. Penanganan akan pemenuhan kebutuhan air bersih dapat dilakukan dengan berbagai cara, disesuaikan dengan potensi wilayah serta sarana dan prasarana yang tersedia. Air bersih jelas mempengaruhi kesehatan dan kecerdasan masyarakat. Wilayah pedesaan yang memiliki potensi sumber air bersih akan tetapi minim sarana dan prasarana dalam pengelolaannya.

Air salah satu sumber daya lokal yang harus tetap dijaga pengelolaannya secara keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Beberapa program telah diluncurkan pemerintah dalam hal pemenuhan kebutuhan air bersih ini. Namun, inisiatif dan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam pemanfaatan sumber air bersih.

Ketersediaan air bersih dan keberlanjutannya sangat erat kaitannya dengan pembangunan. Pembangunan yang berkelanjutan tentunya memperhatikan tiga domain dalam pembangunan, yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain Lingkungan. Integrasi antara ketiga himpunan bagian disebut paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Model pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diresmikan sebagai pengganti *Millennium Development Goals* (MDGs).



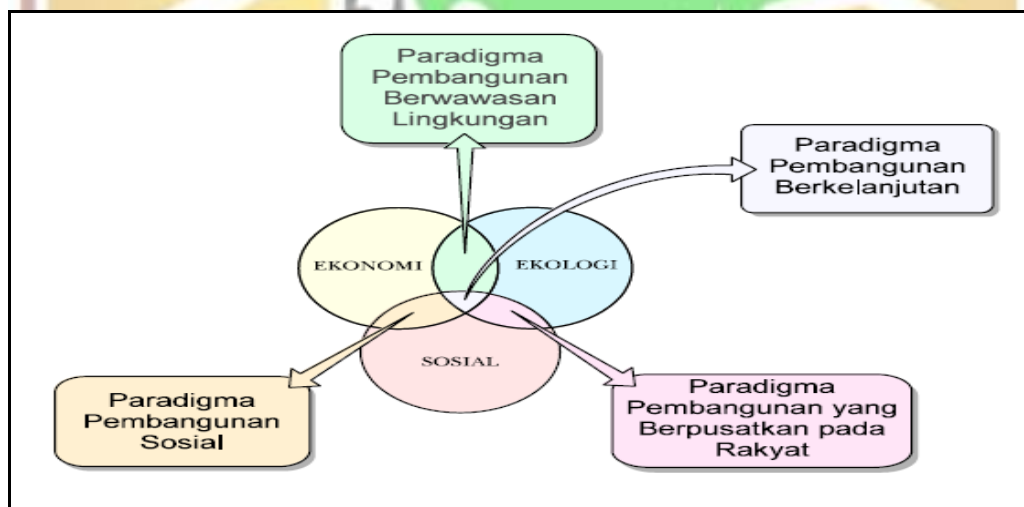
Gambar 1. Paradigma Pembangunan Berkelanjutan

SDGs menganut model keberlanjutan mutakhir, bukan lagi pilar (yang melihat ekonomi, sosial dan lingkungan secara terpisah) atau *triple bottom line* (yang melihat adanya peririsan di antara ketiganya), melainkan model *nested* (yang melihat hubungan ketiganya secara komprehensif: ekonomi bagian dari sosial, dan sosial bagian dari lingkungan). Ini berarti SDGs melihat bahwa tak ada tujuan yang terpisah apalagi bertentangan di antara ketiganya. Secara tegas, ini juga berarti hanya bentuk-bentuk ekonomi yang tunduk pada kepentingan sosial dan kelestarian lingkungan yang diperkenankan untuk dibangun dalam periode 2016-2030. Khusus terkait dengan lingkungan, ekonomi yang boleh dikembangkan adalah ekonomi restoratif—yaitu yang memperbaiki kondisi lingkungan yang rusak—serta ekonomi konservatif—yaitu yang memelihara kondisi lingkungan yang masih baik—yang diperkenankan untuk eksis. Inilah yang kerap dilabel sebagai ekonomi hijau. Di luar itu, harus dianggap sektor ekonomi yang sunset atau transformasi. Dalam bentuk konseptualnya yang formal, lingkungan dinyatakan sebagai salah satu di antara 6 elemen esensial SDGs, yaitu: *planet, people, dignity, prosperity, justice, dan partnership*. Apabila diperhatikan, elemen *people* dan *dignity* masuk ke dalam apa yang disebut sebagai sosial, sementara *prosperity* dan *justice* masuk ke dalam ekonomi.

Ini memberikan penegasan bahwa daya dukung lingkungan dipergunakan untuk membangun kondisi masyarakat yang bermartabat, juga bentuk ekonomi

yang berkeadilan. Hal ini dapat dibaca sebagai bentuk kritik atas logika pembangunan yang selama ini bukan saja merusak lingkungan, namun juga menghasilkan peminggiran sosial, juga ketidakadilan ekonomi. SDGs ingin memperbaiki itu semua lewat logikanya, ditambah dengan penekanan bahwa hal tersebut ingin dicapai melalui kemitraan antar-negara dan antar-sektor.

Namun demikian, dalam pemanfaatan sumber air bersih yang ada di pedesaan khususnya di daerah yang masih tertinggal dan lingkungannya masih hijau serta belum banyak kerusakan seperti di Nagari baruah Gunuang maka konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan MDGs masih relevan untuk dipakai karena faktor kerusakan lingkungan yang masih sangat minim. Artinya konsep pembangunan berkelanjutan dengan aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan yang saling beririsan masih sangat relevan untuk menjadi acuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada. Himpunan bagian yang saling beririsan antara aspek sosial, aspek ekonomi dan aspek lingkungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Paradigma Pembangunan Berkelanjutan yang saling beririsan

Di Indonesia pemerataan pembangunan merupakan suatu hal yang menjadi perhatian negara pada saat sekarang ini. Dalam hal ini pemerintah terus berupaya dan mendorong agar pembangunan yang berbasiskan masyarakat pedesaan. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan mulai dari pedesaan semakin terasa setelah lahirnya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa. Di dalam undang – undang tersebut dinyatakan bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Implementasi dari Undang – Undang tersebut diharapkan akan merubah pola pikir dan pendekatan yang semula cenderung dari atas ke bawah (*Top Down*) menjadi pendekatan partisipatif, dialogis dan bersifat dari bawah ke atas (*Bottom Up*) sehingga memberi peran yang lebih besar kepada Pemerintah Desa dan masyarakat untuk mengembangkan potensi Sumber Daya Alam yang mereka miliki.

Sejalan dengan hal tersebut di Sumatera Barat dimana Nagari yang merupakan sebutan lain dari desa memiliki karakteristik tersendiri. Dimana nuansa adat istiadat tradisional dan kerukunan sosial masih sangat kental terasa. Ini merupakan modal tersendiri bagi pemerintahan Nagari dan lembaga terkait untuk terus berupaya semaksimal mungkin menggali potensi – potensi Sumber Daya Alam yang ada di wilayah mereka untuk dikembangkan bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan pembangunan Nagari itu sendiri.

Banyak Nagari di kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terletak pada kawasan Perbukitan dan pegunungan yang memiliki potensi untuk penyediaan air bersih bagi masyarakat. Salah satu nagari yang memiliki sumber air bersih yang sangat memadai adalah Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota. Nagari ini terletak pada ujung utara kabupaten Lima Puluh Kota yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan kabupaten lain. Nagari ini terletak di antara gugus Bukit Barisan yang mengelilingi nagari tersebut. Kawasan hutan di Nagari ini masih cukup terpelihara dan alami. Sehingga banyak sumber mata air yang ada di perbukitan di nagari ini yang menghasilkan debit air yang tidak terputus walaupun di musim kemarau, salah satu mata air tersebut adalah Batang Maek Kuning.

Potensi inilah yang dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah Nagari dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menambah pendapatan

asli Nagari. Pengelolaan sumber daya alam air oleh masyarakat tentunya diperlukan kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu sendiri bersama pemerintah Nagari agar adanya aturan dan sistim yang akan dibangun di dalam pengelolaan air bersih tersebut. Dalam hal ini pemerintah Nagari dan Masyarakat telah membentuk lembaga Pengelola Air Bersih Tamaek Kuniang (PABTK) yang berdiri pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Nagari Baruah Gunuang Nomor 7 Tahun 2012. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban pengurus pada akhir tahun 2017, air bersih ini telah dimanfaatkan oleh 724 pelanggan yang mencakup dua Nagari yaitu Nagari Baruah Gunuang dan Nagari sungai Naniang dengan jumlah omset pada tahun 2017 mencapai Rp. 136.304.665.

Isu Pokok kelembagaan lokal biasanya adalah masalah keberlanjutan. Apakah lembaga pengelola Air Bersih Tamaek Kuniang (PABTK) akan menjadi lembaga yang akan bertahan lama. Hal ini menarik untuk dikaji dan kalau bisa direplikasi sehingga menjadikannya pedoman dan contoh untuk nagari lainnya yang memiliki potensi yang serupa sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pembangunan wilayahnya. Kemudian Sejalan dengan amanat Undang – Undang Desa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa maka Perlu dikaji dan disusun strategi pengembangan kelembagaan PABTK menjadi salah satu Badan Usaha Milik Nagari yang bergerak di dalam penyediaan air bersih.

Disamping hal tersebut diatas yang menjadi hal penting di dalam pengelolaan Sumber Daya Alam adalah keberlanjutan sistem penyediaan air bersih tersebut. Keberadaan sistem penyediaan air bersih harus sejalan dengan pembangunan yang berkelanjutan, yaitu dimana terdapat upaya dari berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan manusia pada saat ini, namun juga tidak mengurangi kesempatan bagi manusia di generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, berbagai pembangunan yang diadakan saat ini juga harus diupayakan agar tidak menghabiskan sumber daya bagi generasi mendatang, salah satunya adalah pembangunan sarana air bersih dan sanitasi.

Menurut Hodgkins (1994), isu yang berkembang sesuai dengan pembangunan berkelanjutan adalah, yaitu: kelestarian lingkungan; keberlanjutan kelembagaan; pemenuhan kebutuhan yang langgeng; perspektif sistem dan waktu hidup jangka panjang.

Pembangunan wilayah tidak dapat direalisasikan tanpa adanya perubahan – perubahan organisasi sosial dan sistem nilai, karena produktivitas dari suatu sistem ekonomi dan pengelolaan sumber daya dikondisikan oleh budaya dan kelembagaan yang ada di masyarakat (Hayami, 2000). Modal sosial sebagai gambaran kehidupan sosial yang memungkinkan para partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 1993). Di dalam pengelolaan PABTK Nagari Baruah Gunuang, kekhawatiran akan berkurangnya debit air mulai terasa seiring dengan adanya beberapa aktivitas warga dalam pembukaan lahan untuk perkebunan mereka seiring dengan gencarnya masyarakat dalam membuat perkebunan baik itu jeruk yang sedang menjadi idola masyarakat maupun komoditi perkebunan lainnya seperti tembakau, kopi dan sebagainya, sehingga memungkinkan penurunan kualitas daerah tangkapan dan resapan air. Disamping itu PDAM ikut menjadikan Batang Maek Kuniang sebagai salah satu sumber air mereka untuk pemenuhan kebutuhan air bersih Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana pada tahun 2016 telah dipasang pipa – pipa besar untuk distribusi ke Kabupaten walaupun belum digunakan sampai saat sekarang ini. Pembangunan Infrastruktur PDAM yang baru ini dapat menjadi masalah bagi PABTK.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk Meneliti **“Keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Air Bersih Nagari Baruah Gunuang Kecamatan Bukik Barisan Kabupaten Lima Puluh Kota”**

B. Masalah Penelitian

Keberlanjutan Pengelolaan Air bersih merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan karena menurut WHO dan UNICEF (2014) sebanyak 1,8 milyar manusia mengonsumsi air yang terkontaminasi feces dan terancam terpapar penyakit. Air yang terkontaminasi, kondisi sanitasi yang buruk, dan

permasalahan kebersihan menyebabkan kematian 842.000 orang di tahun 2012 (WHO, 2014). Sementara itu, 663 juta orang masih kesulitan mengakses air minum berkualitas (WHO dan UNICEF, 2015). Banyak kota di negara berkembang tidak memiliki infrastruktur dan sumber daya memadai untuk manajemen pengelolaan limbah cair yang efisien dan ramah lingkungan (UN Water, 2017). Kesemua hal tersebut membuat krisis air menjadi agenda global Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian dalam pengelolaan air bersih yang berbasis masyarakat yang telah terlaksana di Indonesia dan Kabupaten Lima Puluh Kota seperti Pamsimas masih terdapat kegagalan dalam pengelolaannya. Berdasarkan data Pamsimas Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016 dari 93 Lokasi Pamsimas yang telah selesai pelaksanaannya terdapat 10 lokasi (9,3 %) yang tidak berfungsi karena kegagalan pengelolaannya. Kegagalan ini tentunya perlu menjadi perhatian bagi pengelolaan air bersih masyarakat yang berbasis masyarakat lainnya. Sehingga dapat dihindari potensi kerugian yang cukup besar serta tidak terpenuhinya kebutuhan air bersih masyarakat.

Peran dan kerjasama masyarakat dalam pengelolaan sumber air bersih batang maek kuniang di Nagari Baruah gunuang menarik untuk dikaji. Karena pengelolaan oleh lembaga yang mereka bentuk sendiri ini merupakan inisiatif dari masyarakat dan tanpa adanya aturan serta pedoman sebelumnya dari pemerintah. Berbeda dengan program – program lainnya seperti Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), program pembangunan air bersih untuk masyarakat berpenghasilan rendah (WSLIC) dan lain sebagainya. Di dalam pengelolaan sumber air bersih Batang Maek kuniang ini Masyarakat bersama pemerintah Nagari adalah aktor utama sehingga berdirinya kelembagaan PABTK yang telah mampu memenuhi kebutuhan air bersih sebanyak 724 KK di dua Nagari di Kecamatan Bukik Barisan.

Masalah yang seringkali terjadi dalam pengelolaan air berbasis masyarakat adalah lemahnya kelembagaan dan tata kelola organisasi yang seringkali tidak berjalan sesuai aturan yang telah disepakati dan kemudian berkurangnya debit sumber air bersih tersebut. Untuk itu perlu dikaji bagaimana pengelolaan air oleh Nagari Baruah Gunuang ini dan bagaimana keberlanjutannya sehingga mampu

menunjang kehidupan dan pembangunan wilayah nagari mereka . Peluang Nagari untuk menjadikan PABTK sebagai salah satu sumber pendapatan mereka semakin terbuka setelah pemerintah menaungi dengan aturan untuk pendirian Badan Usaha Milik Nagari. Akan tetapi apakah perubahan kelembagaan PABTK ini menjadi Badan Usaha Milik Nagari akan memperkuat kelembagaan dan keberlanjutan pengelolaan air bersih di Nagari Baruah Gunuang.

Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada masalah – masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Masyarakat lokal di Nagari Baruah Gunuang mengelola sumber air bersih Batang Maek kuniang
2. Bagaimana Keberlanjutan pengelolaan Sumber Daya Lokal Air bersih Nagari baruah Gunuang

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan sumber air bersih Batang Maek kuniang oleh Masyarakat Lokal Nagari Baruah Gunuang
2. Untuk mengetahui keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Lokal air bersih Nagari Baruah Gunuang

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan teoritis terhadap pengelolaan air bersih berbasis Masyarakat
2. Sebagai bahan contoh dan model bagi Nagari Lain yang memiliki Sumber daya air bersih
3. Sebagai bahan pertimbangan terkait pengelolaan air bersih oleh nagari lainnya